BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pariwisata merupakan industri penting dalam pembangunan global karena memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, kesejahteraan masyarakat, dan penciptaan lapangan kerja. Dalam konteks nasional maupun internasional, sektor ini memiliki kontribusi signifikan terhadap penguatan perekonomian. Laporan *United Nations World Tourism 0rganization dan World Travel and Tourism Council* menunjukkan bahwa industri pariwisata menyumbang sekitar 10% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dunia. Selain itu, sektor ini juga mencatat peningkatan devisa sebesar 25,1% dan memberikan kontribusi hingga US$ 7,58 triliun terhadap total ekspor global. (Nasrulloh et al., 2023). Sektor pariwisata tidak hanya tempat untuk melakukan aktivitas rekreasi melainkan di dalamnya juga berperan sebagai penggerak roda ekonomi seperti kuliner, perhotelan, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), transportasi, dan industri kreatif (Lukito, 2022). Dalam upaya untuk mengembangkan pariwisata diperlukan optimalisasi dan pengembangan pariwisata agar dapat mendorong perputaran ekonomi secara luas dan memiliki *multiplier effect* yang berkelanjutan.

Seiring perkembangan zaman, Pariwisata pada masa kini tidak lagi hanya dipandang sebagai aktivitas rekreasi, tetapi telah menjadi bagian dari kebutuhan masyarakat dalam menjaga keseimbangan sosial dan kejenuhan. Kegiatan rekreasi berfungsi sebagai sarana pemulihan mental, melepas kejenuhan dan menemukan kegembiraan hidup (Aditya Pratama & Wasan, 2022). Fenomena ini membuktikan

bahwa pariwisata tidak lagi dipandang sebagai aktivitas sekunder, melainkan sebagai bagian dari gaya hidup dan kebutuhan psikologis. Oleh karena itu, tingginya kebutuhan masyarakat terhadap layanan pariwisata akan menuntut adanya destinasi wisata yang tidak hanya menarik secara visual namun harus berkualitas, aman, nyaman dan berkelanjutan.

Perkembangan sektor pariwisata saat ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga menekankan pentingnya penerapan konsep pariwisata berkelanjutan guna menjaga kelestarian sumber daya yang menjadi daya tarik utama destinasi wisata tersebut.. Konsep pariwisata berkelanjutan merupakan langkah nyata negara dalam menjaga sumber daya yang dimiliki agar dapat bertahan hingga masa depan dengan berfokus pada faktor-faktor penting dalam segala aspek kehidupan yang utamanya ialah pemenuhan dan keberlanjutan hidup generasi selanjutnya di masa depan (Puttrawandi et al., 2022). Pariwisata berbasis keberlanjutan diciptakan dengan tujuan untuk menciptakan dampak positif dari aktivitas pariwisata terhadap berbagai aspek kehidupan secara berkelanjutan dalam jangka panjang. Menurut Azamovna (2024), penerapan pariwisata berkelanjutan akan dapat memberikan manfaat positif dalam mendorong perkembangan usaha kecil, memperkuat pemahaman terhadap budaya setempat, dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat lokal.

Konsep pariwisata berkelanjutan muncul karena dilatarbelakangi oleh berbagai permasalahan yang timbul pada sektor pariwisata. (Sumarjiyanto, 2020) mengungkapkan bahwa permasalahan yang sering terjadi antara lain tumpang tindihnya regulasi, kurang efektifnya publikasi dan komunikasi, keterbatasan infrastruktur, rendahnya investasi, minimnya perhatian terhadap aspek kelestarian

lingkungan, serta kualitas sumber daya manusia yang rendah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa berbagai permasalahan di sektor pariwisata pada dasarnya berkaitan dengan belum optimalnya tata kelola yang baik dalam pengelolaan pariwisata.

Penerapan tata kelola yang baik memiliki peran penting karena memberikan dampak positif secara langsung serta mendorong pengelolaan yang lebih optimal di masa mendatang. Konsep *good governance* dalam sistem pemerintahan Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang memuat Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), yang didalamnya mencakup kepastian hukum, kemanfaatan, larangan penyalahgunaan wewenang, ketidakberpihakan, kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, serta pelayanan yang berkualitas. Asas-asas tersebut menjadi pedoman bagi para birokrat dalam proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan kebijakan publik agar tetap sesuai dengan prinsip yang berlaku dan mengutamakan kepentingan masyarakat.

Menurut Hidayat & Irvanda (2022) *good governance* berfokus dalam pertumbuhan sektor publik yang baik untuk mengelola sumber daya milik suatu negara dengan pengelolaan pemerintahan yang sinergis secara efektif dan efisien guna kepentingan masyarakat luas dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melarang perbuatan seperti korupsi, kolusi dan nepotisme yang hanya untuk kepentingan pribadi. G*ood governance* menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, efisiensi, dan supremasi hukum. Transparansi erat kaitannya dengan keterbukaan informasi kepada masyarakat, akuntabilitas menuntut pertanggung jawaban atas setiap kebijakan dan program yang

berlangsung, Sementara itu, partisipasi memberikan kesempatan bagi warga untuk ikut serta dalam semua kegiatan dan proses pengambilan keputusan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, tujuannya adalah untuk menciptakan layanan publik yang berkualitas tinggi, responsif, dan berpusat pada masyarakat.

Pemerintah Indonesia menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik untuk meningkatkan efisiensi di organisasi-organisasi nasional di tingkat pusat dan daerah, khususnya dalam memberikan fungsi pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Upaya tersebut sejalan dengan pendapat Koswara et al. (2003) yang menyebutkan bahwa penerapan prinsip-prinsip *good governance* diciptakan untuk menjadi strategi terbaik dalam mengoptimalkan transformasi birokrasi sehingga mampu menghasilkan pelayanan publik yang efektif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Tentunya pelayanan publik tidak hanya bersifat administratif namun di dalamnya mencakup penyediaan fasilitas umum, penyediaan jasa, dan barang publik guna menunjang kesejahteraan masyarakat.

Pengembangannya dalam sektor pariwisata, prinsip-prinsip *good governance* juga diterapkan dalam tata kelola destinasi wisata yang dikenal dengan istilah *Good Tourism Governance* (GTG), yaitu suatu sistem tata kelola yang secara khusus dirancang untuk menjadi pedoman dalam pengelolaan pariwisata agar berjalan secara efektif, partisipatif, dan berkelanjutan. Menurut Sunaryo (2013) Konsep *Good Tourism Governance* menekankan pada kualitas koordinasi dan kolaborasi antar aktor yang terlibat dalam sektor pariwisata

Konsep *good tourism governance* tercermin melalui keterlibatan aktif dan sinergi yang kuat antara tiga aktor utama, yakni pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat dalam pengelolaan sektor pariwisata. Pemerintah selaku aktor yang

krusial berperan dalam penyusunan regulasi dan monitoring, sektor swasta berkontribusi melalui investasi dan inovasi, sedangkan masyarakat menjadi pelaku utama sekaligus penerima dampak dari aktivitas pariwisata (Utamy et al., 2023). Ketiga unsur tersebut harus saling bersinergi secara terpadu agar pengelolaan destinasi mampu menghasilkan manfaat ekonomi tanpa mengabaikan aspek lingkungan dan sosial. Dengan demikian, *good tourism governance* menjadi pendekatan penting dalam pengembangan pariwisata karena perlu keterlibatan aktif dan sistem yang jelas.

Setiap aktor yang terlibat sudah memiliki kewenangannya masing-masing dan harus berjalan pada koridor-koridor yang sudah ditentukan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Konsep *good tourism governance* ini menjadikan pemerintah bertindak sebagai fasilitator dan regulator yang mengemban tugas dalam menciptakan kebijakan atau aturan untuk mendukung keberlanjutan pariwisata dan mengajak partisipasi aktif masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan. Pemerintah juga bertugas dalam penyediaan fasilitas saran dan prasarana seperti toilet umum yang bersih, tempat sampah, tempat duduk, dan layanan publik lainnya (Hajar et al., 2024). Untuk hadirnya pihak swasta disini untuk mendukung permodalan dalam pembangunan pariwisata. Sedangkan masyarakat berperan sebagai pemegang peran penting dalam pengelolaan dan pengembangan wisata dalam memberikan kontribusi, ide, masukan, keterampilan dan tenaga (Ginting et al., 2021).

Berdasarkan pembagian kewenangan dan tugasnya masing-masing antara ketiga aktor perlu dikuatkan lagi melalui kerangka regulasi yang jelas sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan Regulasi atau aturan diterapkan

berfungsi untuk mengarahkan pembangunan pariwisata agar berjalan secara sistematis dan terkoordinasi dengan baik agar tetap mengedepankan prinsip pariwisata berkelanjutan, di Indonesia penyelenggaraan sektor pariwisata telah diatur melalui UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang menjadi landasan hukum utama dalam pengembangan dan pengelolaan seluruh aktivitas pariwisata nasional. Regulasi tersebut menegaskan bahwa pembangunan kepariwisataan harus dilaksanakan secara berkelanjutan, serta tanggung jawab penuh dengan tetap memegang prinsip nilai-nilai agama, sosial, budaya, dan kelestarian lingkungan hidup (Sulistyadi et al., 2017).

Hadirnya regulasi tersebut menunjukkan bahwa sektor pariwisata memiliki posisi strategis dalam pembangunan nasional. Melalui kebijakan yang terstruktur dan terencana, pemerintah berupaya menjadikan pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui terbukanya lapangan pekerjaan baru, dan mendorong daya kompetitif di tingkat internasional (Kemenko Perekonomian, 2025). Sejalan dengan arah kebijakan tersebut. Pemerintah terus mengembangkan berbagai potensi wisata di berbagai daerah sebagai langkah serius dalam meningkatkan daya saing di kancah pariwisata tingkat nasional. Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam, budaya, serta keanekaragaman hayati yang melimpah dan sangat besar sehingga dapat membuka peluang untuk pengembangan berbagai jenis destinasi wisata, termasuk wisata alam, wisata budaya, hingga ekowisata berbasis konservasi (Purba et al., 2024)

Salah satu bentuk pengembangan pariwisata di Indonesia yang saat ini semakin berkembang adalah konsep desa wisata. Desa wisata merupakan bentuk

pengembangan pariwisata yang mengintegrasikan potensi lokal desa, seperti budaya, tradisi, lingkungan, dan aktivitas ekonomi masyarakat. Konsep ini berkembang di berbagai daerah karena dinilai mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, kualitas hidup, serta mendorong kepedulian warga terhadap kelestarian lingkungan (Setiawan et al., 2023).

Desa wisata di Indonesia diklasifikasikan menjadi empat kategori, yaitu desa wisata rintisan, berkembang, maju, dan mandiri. Pengelompokan tersebut didasarkan pada beberapa indikator, seperti jumlah wisatawan, perkembangan industri wisata, keberagaman produk dan aktivitas wisata, ketersediaan sarana pendukung, serta kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan pariwisata. Klasifikasi ini digunakan untuk melihat tingkat perkembangan dan kesiapan desa dalam mendukung sektor pariwisata berkelanjutan. Selain itu, pembagian kategori tersebut juga menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan strategi pembinaan dan pengembangan desa wisata (Wirdayanti et al., 2021).

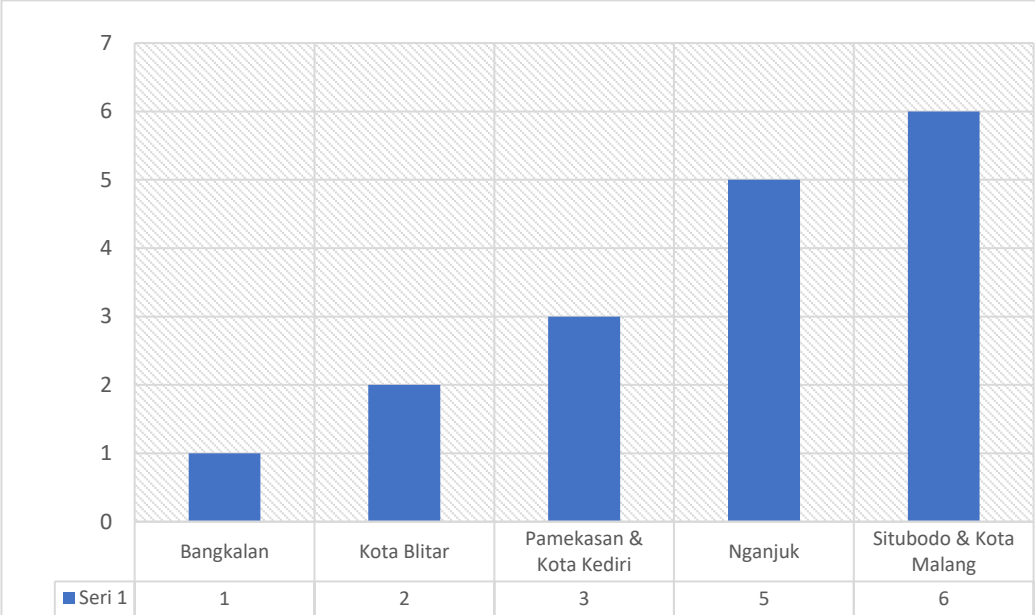


Gambar 1.1 Sepuluh Provinsi Dengan Desa Wisata Terbanyak Tahun 2026

Sumber : (Jadesta, 2026)

Jumlah desa wisata yang tersebar di Indonesia sebanyak 6190 destinasi. Berdasarkan pada Gambar 1.1 sebagian besar desa wisata tersebar pada sepuluh provinsi. Provinsi Jawa Timur mencatatkan sebagai wilayah dengan jumlah destinasi desa wisata terbanyak di Indonesia, Banyaknya destinasi desa wisata di provinsi-provinsi tersebut menunjukkan bahwa sangat besar sekali potensi pengembangan desa wisata di berbagai daerah Indonesia. Kondisi ini juga mencerminkan bahwa desa wisata semakin berkembang sebagai salah satu bentuk pengelolaan pariwisata yang melibatkan masyarakat secara langsung. Dengan demikian, peningkatan jumlah desa wisata di berbagai provinsi tersebut menunjukkan bahwa desa wisata sudah menjadi salah satu strategi penting pemerintah dalam mendorong pembangunan pariwisata berbasis masyarakat di Indonesia, yang ditandai dengan pertumbuhan yang cukup besar dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir.

Dominasi Provinsi Jawa Timur dalam jumlah desa wisata menunjukkan bahwa wilayah ini mempunyai potensi pariwisata yang sangat besar, ditinjau dari sisi kondisi geografi, sumber daya alam, budaya, dan masyarakat yang partisipatif. Keberagaman kondisi wilayah yang terdapat jajaran pegunungan, kawasan hutan, pedesaan, hingga pesisir pantai menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang ingin memperoleh pengalaman wisata yang lebih menarik (Parameswari et al., 2022). Potensi tersebut juga memberikan kesempatan bagi masyarakat lokal untuk berpartisipasi langsung dalam pengelolaan destinasi melalui pengembangan desa wisata berbasis komunitas. Hal ini mencerminkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan sektor pariwisata.



Gambar 1.2 Kabupaten/Kota Dengan Jumlah Desa Wisata Terendah
Sumber : Jadesta (2026)

Namun, pada kenyataannya persebaran desa wisata di Jawa timur menunjukkan kondisi yang tidak merata di setiap daerahnya. Beberapa kabupaten mampu mengembangkan desa wisata dalam jumlah yang relatif banyak seperti kabupaten jember yang memiliki 49 destinasi desa wisata. Hal itu, didukung oleh potensi sumber daya alam, intervensi pemerintah yang aktif, partisipasi masyarakat, dan arah kebijakan yang jelas. Pada Gambar 1.2 menunjukkan lima kabupaten/kota dengan desa wisata terendah yang didalamnya terdapat Kabupaten Bangkalan, Kota Blitar, Kabupaten Pamekasan, Kota Kediri, Kabupaten Nganjuk, Kota Malang dan Kabupaten Situbondo.

Salah satu daerah yang termasuk dalam kelompok kabupaten dengan jumlah desa wisata yang relatif sedikit di Provinsi Jawa Timur adalah Kabupaten Situbondo yang hanya memiliki 6 desa wisata. Kabupaten Situbondo memiliki karakteristik wilayah yang cukup strategis berada di kawasan pesisir pantai utara Pulau Jawa serta dilalui oleh jalur utama Pantai Utara (Pantura). Wilayah ini juga memiliki

potensi geografis dan ekologis yang beragam dapat berpotensi untuk dikembangkan menjadi daya tarik wisata berbasis alam dan konservasi edukasi. Kabupaten Situbondo juga memiliki wilayah laut yang cukup luas, yakni sekitar 1.142,4 km^2, dengan karakteristik wilayah pesisir yang mendominasi di daerah tersebut. Secara geografis, kawasan pesisir menjadi wilayah yang memiliki potensi besar dalam pengembangan berbagai aktivitas berbasis pemanfaatan kawasan pantai sebagai daya tarik wisata (Pahlewi & Handayani, 2023). Kondisi ini membuktikan bahwa terdapat kesenjangan sosial antara potensi sumber daya yang dimiliki dengan tingkat pengembangan destinasi wisata yang ada di daerah tersebut.

Kondisi geografis yang didominasi oleh kawasan pesisir pantai dan ditumbuhi banyak spesies mangrove sangat cocok dikembangkan menjadi kawasan pariwisata berbasis lingkungan. Destinasi yang dikembangkan ialah Ekowisata Kampung Blekok yang terletak di Desa Klatakan, Kecamatan Kendit. Kawasan Ekowisata Kampung Blekok merupakan destinasi unggulan Kabupaten Situbondo yang memadukan konservasi mangrove dan pelestarian burung air. Ekosistem Mangrove cukup penting bagi keseimbangan lingkungan dan menjadi habitat asli dari berbagai spesies burung air (Kurniawati, 2024). Kawasan ini juga berfungsi sebagai area konservasi mangrove dengan luas mencapai sekitar 25 hektar, dan area yang dimanfaatkan sebagai kawasan wisata hanyalah sekitar 6 hektar.

Ide pengembangan Ekowisata Kampung Blekok bermula dari inisiatif lokal yang digagas oleh Pak Kholid, seorang warga asli Desa Klatakan yang hingga saat ini menjabat sebagai ketua Pokdarwis. Sebagai masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir yang ditumbuhi mangrove dan menjadi habitat berbagai jenis burung air menjadikan sebuah ide besar dalam melihat potensi wisata berbasis lingkungan dan

konservasi yang dapat dikembangkan. Ide tersebut disampaikan melalui dialog terbuka kepada Kepala Desa Klatakan untuk menjadi sebuah pertimbangan dalam pengembangannya bersama Pemerintah Kabupaten Situbondo. Setelah melalui proses panjang akhirnya pada tahun 2017 melalui kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Situbondo dan PT POMI melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) mulai melakukan pengembangan Ekowisata Kampung Blekok di Desa Klatakan dengan membangun seluruh fasilitas yang menunjang wisata mulai dari dermaga kayu yang menyusuri mangrove, tempat swafoto, tempat penangkaran burung blekok, taman, fasilitas penunjang seperti toilet dan tempat ibadah serta *Education Learning Centre* guna mendukung kegiatan edukasi dan konservasi.

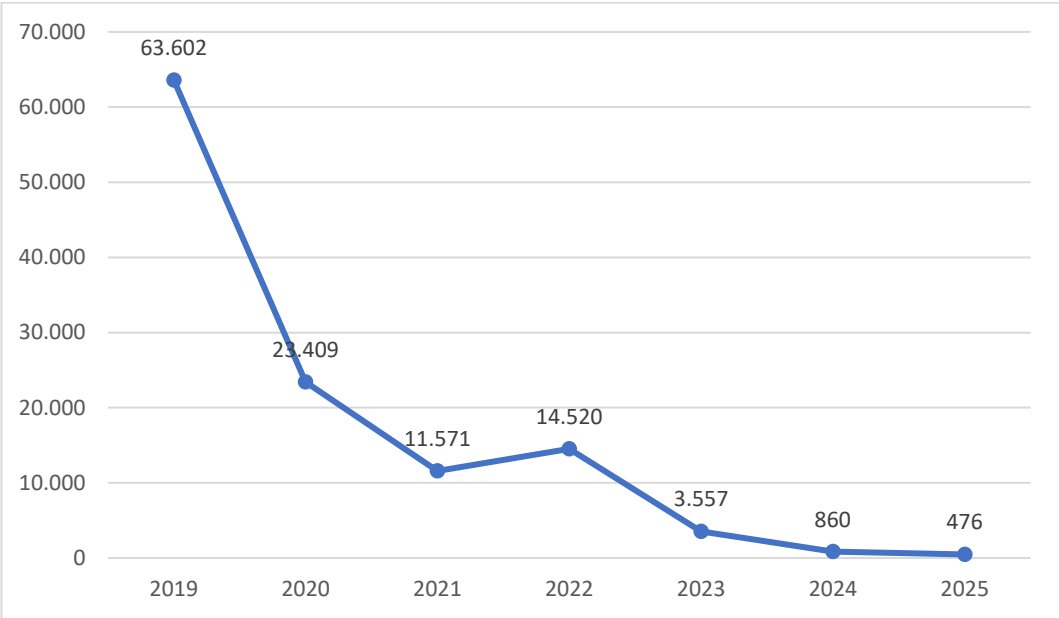
Komitmen Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam mengembangkan Ekowisata Kampung Blekok ditunjukkan melalui penerbitan Perbup Situbondo Nomor 13 Tahun 2017 tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati sebagai upaya perlindungan kawasan wisata secara berkelanjutan. Kebijakan tersebut kemudian diperkuat dengan Perdes Klatakan Nomor 7 Tahun 2018 mengenai Pengelolaan Obyek Wisata Kampung Blekok. Dalam pelaksanaannya, juga dibentuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang berperan mendukung pengelolaan serta pengembangan kawasan ekowisata tersebut. Dengan adanya landasan regulatif dan kelembagaan tersebut, pengelolaan kawasan wisata ini diharapkan dapat berjalan secara terarah dan berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan kualitas destinasi serta memperkuat daya tarik wisata Kampung Blekok sebagai salah satu potensi pariwisata unggulan di Kabupaten Situbondo.

Dalam pengelolaan Ekowisata Kampung Blekok didalamnya meliputi kegiatan monitoring lingkungan secara rutin, termasuk perawatan dan pemeliharaan tanaman mangrove serta pengelolaan kebersihan kawasan yang melibatkan petugas dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) selaku penanggung jawab teknis Kampung Blekok. Selain itu, program edukasi dan konservasi juga dilaksanakan, seperti kegiatan penanaman mangrove yang rutin dilakukan serta monitoring biodiversitas burung blekok. Fasilitas pendukung di Kampung Blekok sudah memadai yang dibuktikan dengan adanya fasilitas ruangan untuk edukasi yaitu Kampung Blekok *Learning Center, Coffe Shop, Art Shop,* serta berbagai sarana edukasi dan area swafoto bagi pengunjung. Upaya tersebut dilakukan sebagai komitmen dalam mengembangkan Kampung Blekok yang mengintegrasikan fungsi konservasi, edukasi, dan rekreasi.

Seiring berjalannya waktu komitmen tersebut terjawab melalui beberapa prestasi yang diperoleh. Ekowisata Kampung Blekok menunjukkan prestasi yang cukup membanggakan. Pada tahun pertama pembukaan Ekowisata Kampung Blekok langsung meraih penghargaan Juara 1 Anugerah Wisata Jawa Timur Kategori Daya Tarik Wisata Alam. Perkembangan destinasi ini semakin terlihat pada tahun ketiga pengelolaannya, yakni tahun 2021, ketika Kampung Blekok berhasil meraih penghargaan tingkat nasional dengan masuk dalam 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI). Pada ajang yang sama, Ekowisata Kampung Blekok juga memperoleh predikat Juara 1 kategori Desa Wisata Rintisan ADWI 2021 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Berbagai penghargaan dari kancah Nasional hingga regional ini membuktikan bahwa pada masa itu Kampung Blekok dinilai memiliki kesiapan,

kelembagaan yang baik, potensi daya tarik, serta pengelolaan yang dinilai menjanjikan dalam pengembangan desa wisata berbasis lingkungan.

Seiring dengan berbagai pencapaian yang diperoleh Kampung Blekok, Kondisi empiris menunjukkan adanya fenomena yang bertolak belakang antara prestasi yang diraih dengan kinerja destinasi. Pengakuan dan penghargaan yang diraih belum sepenuhnya menunjukkan sisi pariwisata keberlanjutan yang dilihat berdasarkan performa di lapangan secara langsung



Gambar 1.3 Data Kunjungan Ekowisata Kampung Blekok 2019-2025
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo (2026)

Menurut Data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo pada Gambar 1.3 menunjukkan bahwa tren penurunan kunjungan Ekowisata Kampung Blekok tiap tahunnya mengalami penurunan drastis, kecuali tahun 2022 yang mengalami kenaikan namun tidak signifikan. Penurunan yang drastis dan berlangsung secara terus menerus tiap tahunnya mengindikasikan adanya permasalahan yang lebih mendasar dalam pengelolaan destinasi tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi langsung yang dilakukan oleh peneliti bersama selaku ketua pokdarwis Kampung Blekok, ditemukan beberapa permasalahan dalam pengelolaan kawasan wisata tersebut. Temuan ini sejalan dengan penelitian Febrian dan Suresti (2020), Charisma (2025), serta Silviana (2023). Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wisata Kampung Blekok masih tergolong rendah serta koordinasi antar pemangku kepentingan belum berjalan optimal. Permasalahan tersebut berkaitan dengan prinsip partisipasi masyarakat dalam *Good Tourism Governance* menurut Sunaryo (2013), yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata. Rendahnya partisipasi menunjukkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya mengambil peran aktif dalam mendukung pengelolaan destinasi. Padahal, keterlibatan masyarakat diperlukan agar pengembangan pariwisata tidak hanya berorientasi pada pengelolaan destinasi, tetapi juga mampu mendorong rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap keberlanjutan kawasan wisata.

Pengelolaan lingkungan juga masih menghadapi kendala yang terlihat dari kondisi sanitasi di sekitar kawasan yang belum memenuhi standar laik sehat, Permasalahan lingkungan tersebut berkaitan dengan prinsip daya dukung lingkungan dan akuntabilitas lingkungan dalam *Good Tourism Governance* menurut Sunaryo (2013). Kondisi sanitasi yang belum memenuhi standar kesehatan menunjukkan bahwa daya dukung lingkungan di kawasan wisata masih perlu diperhatikan agar aktivitas pariwisata tidak menurunkan kualitas lingkungan. Di sisi lain, kondisi tersebut juga berkaitan dengan akuntabilitas lingkungan, yaitu

tanggung jawab para pemangku kepentingan dalam menjaga dan memastikan pengelolaan lingkungan berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Dari sisi ekonomi, masyarakat Kampung Blekok telah terlibat dalam kegiatan pariwisata melalui usaha kuliner, penjualan cendera mata, dan penyediaan penginapan. Meskipun demikian, keberadaan pariwisata belum memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat di wilayah pesisir timur Kabupaten Situbondo. Hal ini menunjukkan bahwa manfaat ekonomi pariwisata belum dirasakan secara merata oleh masyarakat setempat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan Kampung Blekok masih menghadapi tantangan dalam aspek partisipasi masyarakat, pengelolaan lingkungan, dan pemerataan manfaat ekonomi.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, masih terdapat berbagai permasalahan dalam penerapan tata kelola pariwisata pada pengembangan ekowisata berkelanjutan di Kampung Blekok. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji dan menganalisis pengelolaan Ekowisata Kampung Blekok di Kabupaten Situbondo dengan menggunakan prinsip *good tourism governance* menurut Bambang Sunaryo (2013), yang mencakup partisipasi masyarakat, keterlibatan pemangku kepentingan, kemitraan dan kepemilikan lokal, pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan, akomodasi aspirasi masyarakat, daya dukung lingkungan, monitoring dan evaluasi program, akuntabilitas lingkungan, pelatihan dan pemberdayaan, serta promosi dan nilai budaya lokal. Berdasarkan fokus tersebut, penelitian ini berjudul "Penerapan *Good Tourism Governance* Dalam Pengembangan Ekowisata Berkelanjutan di Kampung Blekok Kabupaten Situbondo".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena dan isu yang telah diuraikan di latar belakang, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu Bagaimana Penerapan Prinsip *Good Tourism Governance* dalam Pengembangan Ekowisata Berkelanjutan di Kampung Blekok Kabupaten Situbondo?.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dilakukan yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis terkait penerapan prinsip dari Good Tourism Governance dalam pengembangan ekowisata berkelanjutan di Kampung Blekok Kabupaten Situbondo.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang terlibat yaitu :

1.4.1 Bagi Pembaca

Dapat dijadikan bahan bacaan untuk memperkaya pengetahuan dan wawasan mengenai pengembangan ekowisata berkelanjutan di Kampung Blekok dengan mengacu pada prinsip tata kelola pariwisata yang baik. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan bagi pembaca yang akan melakukan penelitian lebih lanjut terkait topik yang sama.

1.4.2 Bagi Penulis

Menerapkan ilmu dan teori yang telah diperoleh penulis selama perkuliahan dalam dunia administrasi publik dan mengasah kemampuan metodologis terkait tata kelola pariwisata dalam pengembangan desa wisata berkelanjutan di

Kampung Blekok Kabupaten Situbondo. Penelitian ini juga merupakan salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana pada program studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Budaya dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

1.4.3 Bagi Universitas

Kajian ini diharapkan untuk menambah bahan literatur pada perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur yang dapat digunakan sebagai referensi ilmiah dan pembanding untuk penelitian selanjutnya yang akan dilakukan.

1.4.4 Bagi Informan Terkait

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan evaluasi kepada informan yang menjadi aktor penting dalam pelaksanaan tata kelola pariwisata pada ekowisata Kampung Blekok yaitu pihak pemerintahan daerah, pemerintahan desa, pengelola wisata Kampung Blekok, masyarakat lokal, dan pihak swasta.